Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
E-ISSN : 2987-0763
DOI : 10.59966/ekalaya.v4i3.2948

EKALAYA
Jurnal Ekonomi Akuntansi

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas Laporan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung: Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi

Sofia Amaliatul Khusna[1,*], Risky Budianto[2]
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia[1,2]
sofia.23161@mhs.unesa.ac.id

Diserahkan tanggal 08 Juli 2026 | Diterima tanggal 16 September 2026 | Diterbitkan tanggal 30 September 2026

Abstract:
This study examines the effect of transparency and accountability on the quality of local government financial reports at the Regional Secretariat of Tulungagung Regency and tests whether human resource quality moderates these relationships. Grounded in agency theory, this quantitative associative-causal study used a cross-sectional questionnaire survey of 41 employees involved in financial management, selected through purposive sampling, with age, education, and length of service as control variables. Data were analyzed using PLS-SEM with SmartPLS 4. The measurement model satisfied the criteria of indicator reliability, internal consistency reliability, convergent validity, and discriminant validity, and the structural model showed no collinearity problem. The results show that accountability has a positive and significant effect on financial report quality, whereas transparency has no direct effect. Human resource quality has a positive direct effect and moderates the effect of transparency at the 10% significance level as a quasi moderator, but it does not moderate the effect of accountability. The model explains 87.0% of the variance in financial report quality. These findings suggest that the Regional Secretariat should strengthen accountability mechanisms and continuously improve the quality of its human resources.

Keywords: *Transparency, Accountability, Financial Report Quality, Human Resource Quality, Agency Theory,.*

Abstrak *:*
Penelitian ini menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung serta peran kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai variabel moderasi. Berlandaskan teori keagenan, penelitian kuantitatif asosiatif kausal ini menggunakan survei kuesioner cross-sectional terhadap 41 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, dipilih dengan teknik purposive sampling, dengan usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja sebagai variabel kontrol. Data dianalisis menggunakan PLS-SEM dengan SmartPLS 4. Model pengukuran memenuhi kriteria indicator reliability, internal consistency reliability, convergent validity, dan discriminant validity, dan model struktural tidak menunjukkan masalah kolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh langsung. Kualitas SDM berpengaruh positif secara langsung dan memoderasi pengaruh transparansi pada taraf signifikansi 10% sebagai moderasi semu, tetapi tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas. Model mampu menjelaskan 87,0% variasi kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya Sekretariat Daerah memperkuat mekanisme akuntabilitas dan meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan.

Kata Kunci*:* *Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teori Keagenan.*

Copyright © 2026, Author
This is an open-access article under the CC BY 4.0

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kewenangan tersebut diikuti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Maulamin et al., 2019; Luqyana & Islahuddin, 2022). Pada tingkat kabupaten, Sekretaris Daerah berperan sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga Sekretariat Daerah menempati posisi strategis dalam penyusunan laporan keuangan.

Kabupaten Tulungagung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut pada tahun 2019 sampai 2024 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020, 2025). Meskipun demikian, opini WTP tidak serta-merta menjamin laporan keuangan bebas dari temuan pemeriksaan (Yuditiya et al., 2023). Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024 masih mencatat tiga temuan yang melibatkan Sekretariat Daerah (Tabel 1). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kualitas laporan keuangan, yang menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ditandai oleh sifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Hardinto et al., 2025), belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1. Temuan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024 yang Melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

Temuan	Rincian
Koordinasi regulasi hibah	Belum tuntas
Keterlambatan laporan pertanggungjawaban hibah	20 penerima hibah senilai Rp677 juta; keterlambatan 45 sampai 339 hari
Penatausahaan aset tetap	457 bidang tanah belum bersertifikat dan 509 kendaraan menunggak pajak

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2025).

Temuan pada Tabel 1 berkaitan dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban dan ketertiban penatausahaan, yang menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan laporan keuangan. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas SDM. Selain itu, hasil penelitian terdahulu belum konsisten. Pengaruh positif transparansi ditemukan oleh Zubaidah dan Nugraeni (2023), Ibrahim et al. (2024), Utami (2024), serta Hamsinar (2022), tetapi tidak ditemukan oleh Ferlia et al. (2023) maupun Lara Sati dan Taufik (2025). Pengaruh positif akuntabilitas dilaporkan oleh Ferlia et al. (2023), Utami (2024), Hamsinar (2022), serta Lara Sati dan Taufik (2025), sedangkan Zubaidah dan Nugraeni (2023) serta Ibrahim et al. (2024) tidak menemukannya. Peran moderasi kompetensi SDM juga beragam: Indrayani (2020) menemukan adanya moderasi, sementara Dreksi et al. (2025) dan Yenni et al. (2020) tidak. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan perlunya pengujian empiris lebih lanjut pada konteks objek yang berbeda.

Penelitian ini berlandaskan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yaitu hubungan kontraktual ketika prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen. Dalam hubungan tersebut, agen umumnya menguasai informasi lebih banyak daripada prinsipal sehingga muncul asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan (Fitri & Arza, 2023). Pada pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah sebagai agen wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan. Sekretariat Daerah, sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, berada pada posisi agen yang mengoordinasikan penyusunan laporan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua mekanisme yang

dapat menekan asimetri informasi, sedangkan efektivitas keduanya diduga bergantung pada kualitas SDM sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah kemampuan laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus bentuk pertanggungjawaban entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Badan Pemeriksa Keuangan, 2010; Mardiasmo, 2021).

Transparansi adalah jaminan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan (Kurniawati & Sadeli, 2021), yang menekankan ketersediaan dan aksesibilitas informasi bagi pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2021). Dalam kerangka teori keagenan, keterbukaan dokumen anggaran, laporan realisasi, dan laporan keuangan memberi prinsipal dasar informasi untuk mengawasi agen, sehingga agen terdorong menyusun laporan secara lebih cermat karena penyimpangan lebih mudah terdeteksi. Keterbukaan yang disertai ketepatan waktu dan kejelasan penyajian juga mendukung terpenuhinya karakteristik relevan dan andal. Pengaruh positif transparansi ditemukan oleh Zubaidah dan Nugraeni (2023), Ibrahim et al. (2024), Utami (2024), serta Hamsinar (2022). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1: *Transparansi* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan melaporkan kegiatannya kepada pemberi amanah (Suryono, 2021; Mardiasmo, 2021). Dalam teori keagenan, akuntabilitas merupakan sarana untuk menekan konflik kepentingan dan risiko penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas yang berjalan, tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan, pelaporan berkala, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi yang dapat ditelusuri, dapat mencegah penyimpangan dan ketidaktertiban dalam pengelolaan aset maupun belanja sehingga informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih andal. Pengaruh positif akuntabilitas dilaporkan oleh Ferlia et al. (2023), Utami (2024), Hamsinar (2022), serta Lara Sati dan Taufik (2025). Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2: *Akuntabilitas* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas SDM adalah kemampuan pegawai mengelola pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif (Aldino & Septiano, 2021), termasuk pemahaman standar akuntansi dan kemampuan menggunakan sistem informasi keuangan (Halim & Kusufi, 2021). Menurut teori keagenan, efektivitas transparansi dalam menekan asimetri informasi tidak terlepas dari kapasitas aparatur yang menjalankan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pegawai yang kompeten lebih mampu menerjemahkan keterbukaan informasi menjadi laporan yang akurat dan tepat waktu, sedangkan pada kompetensi yang terbatas informasi berisiko tidak akurat meskipun telah dipublikasikan. Indrayani (2020) menemukan bahwa kompetensi SDM memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3: *Kualitas SDM* memperkuat pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.

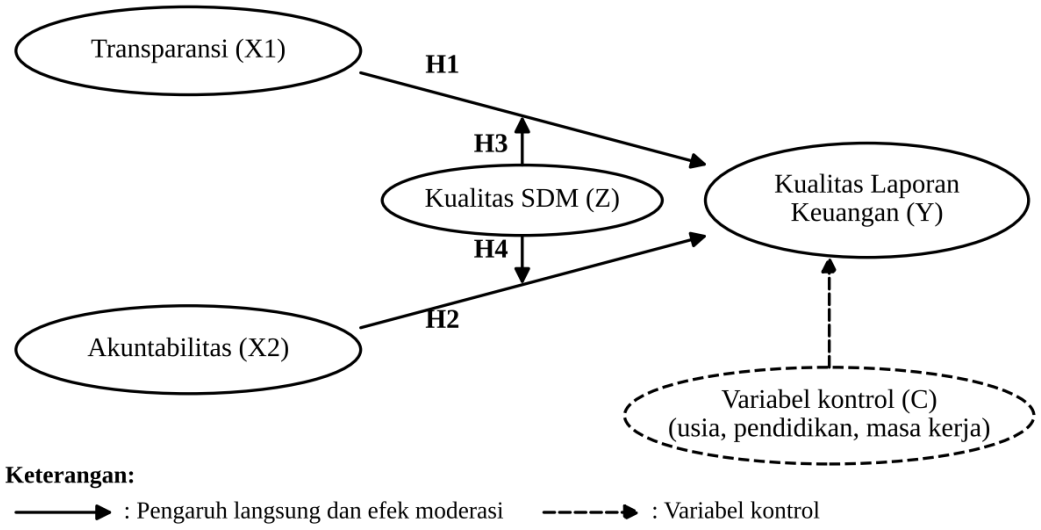
Hal yang sama diduga berlaku pada akuntabilitas. Aparatur dengan kompetensi teknis akuntansi yang baik lebih mampu menerjemahkan kewajiban pertanggungjawaban ke dalam pencatatan dan pelaporan yang konsisten dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada aparatur dengan kompetensi terbatas, mekanisme akuntabilitas berpotensi tidak cukup mencegah kesalahan pencatatan maupun keterlambatan pelaporan, sebagaimana tampak pada keterlambatan pertanggungjawaban hibah (Tabel 1). Meskipun demikian, Dreksi et al. (2025) dan Yenni et al.

(2020) tidak menemukan peran moderasi kompetensi SDM. Hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut.

H4: *Kualitas SDM* memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena (1) menjadikan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai objek yang belum diteliti secara khusus, (2) menguji kualitas SDM sebagai variabel moderasi pada dua hubungan sekaligus dan menentukan jenis moderasinya dengan kerangka Sharma et al. (1981), serta (3) menggunakan usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja sebagai variabel kontrol dengan data primer terbaru. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan serta apakah kualitas SDM memperkuat kedua pengaruh tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai hal tersebut, dan hasilnya diharapkan memperkaya literatur akuntansi sektor publik serta menjadi masukan bagi Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan, kerangka konseptual penelitian disusun untuk menggambarkan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kualitas SDM sebagai variabel moderasi serta usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja sebagai variabel kontrol (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe asosiatif kausal, yaitu menguji hubungan antarvariabel melalui pengukuran dengan instrumen dan analisis statistik (Creswell & Creswell, 2023). Transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi kualitas laporan keuangan (Y), kualitas SDM (Z) sebagai variabel moderasi, serta usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja sebagai variabel kontrol (C). Data dikumpulkan melalui survei *cross-sectional* pada satu periode waktu, yaitu September sampai Oktober 2026, di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Lokasi dipilih karena Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah, masih

terdapat temuan pemeriksaan BPK yang melibatkan unit kerja ini, dan belum terdapat penelitian terdahulu yang menjadikannya objek secara khusus. Selain kuesioner sebagai data primer, penelitian ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD sebagai data sekunder untuk menggambarkan fenomena penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, yang terdiri atas aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tenaga *outsourcing*. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* (Pujiono et al., 2023) berdasarkan dua kriteria, yaitu (a) bertugas di bidang pengelolaan keuangan, dan (b) terlibat langsung dalam penatausahaan, penyusunan, atau verifikasi laporan keuangan. Teknik ini dipilih karena tidak semua pegawai terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dari kriteria tersebut diperoleh 41 responden.

Sebelum penelitian utama, uji coba instrumen (*pilot test*) dilakukan terhadap 32 responden yang berasal dari populasi yang sama untuk memeriksa pemahaman responden terhadap pernyataan kuesioner dan kualitas pengukuran awal. Kuesioner penelitian utama disebarkan secara langsung kepada responden yang memenuhi kriteria sampel.

Variabel dan Pengukuran

Instrumen berupa kuesioner terstruktur dengan pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert lima tingkat (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Seluruh konstruk diukur secara reflektif. Kualitas laporan keuangan (Y) diukur melalui empat karakteristik kualitatif menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Transparansi (X1) diukur melalui tiga dimensi, yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Akuntabilitas (X2) diukur melalui empat dimensi, yaitu kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Kualitas SDM (Z) diukur melalui tiga dimensi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja responden digunakan sebagai variabel kontrol.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif dan *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4. PLS-SEM dipilih karena sesuai untuk sampel kecil, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, serta mampu menguji model pengukuran dan model struktural secara simultan (Hair et al., 2022). Model pengukuran reflektif (*outer model*) dievaluasi melalui *Indicator reliability* (*outer loading* ≥ 0,70), *Internal consistency reliability* (Cronbach's alpha, rho_A, dan *composite reliability* di atas 0,70), *Convergent validity* (*Average Variance Extracted*/AVE > 0,50), dan *Discriminant validity* (*Heterotrait-Monotrait Ratio*/HTMT < 0,90).

Model struktural (*inner model*) dievaluasi melalui kolinearitas (*Variance Inflation Factor*/VIF di bawah 5 dan sebaiknya di bawah 3), koefisien determinasi (R^2), serta pengujian koefisien jalur dengan *bootstrapping*. Karena penelitian bersifat eksploratif dengan sampel terbatas, hipotesis diuji pada taraf signifikansi 10% (t > 1,645 atau p < 0,10). Variabel interaksi dibentuk dengan pendekatan dua tahap (*two-stage*). Jenis moderasi ditentukan berdasarkan kerangka Sharma et al. (1981), yang membedakan moderasi murni, moderasi semu, dan variabel prediktor biasa.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden berjumlah 41 orang dengan usia rata-rata sekitar 33,63 tahun. Kelompok usia terbanyak adalah 26–35 tahun (13 orang; 31,71%). Responden perempuan berjumlah 29 orang (70,73%), dan sebagian besar berpendidikan S1 (33 orang; 80,49%). Menurut bagian kerja,

responden terbanyak berasal dari Bagian Perencanaan dan Keuangan (19 orang; 46,34%), sedangkan masa kerja terbanyak berada pada rentang 1–5 tahun (16 orang; 39,02%).

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif keempat variabel. Rata-rata jawaban responden berada di atas titik tengah skala (3,00), yaitu 3,790 untuk transparansi, 4,018 untuk akuntabilitas, 3,984 untuk kualitas laporan keuangan, dan 4,073 untuk kualitas SDM, sehingga secara umum responden menilai keempat variabel cukup tinggi. Kualitas SDM memiliki rata-rata tertinggi, sedangkan transparansi memiliki rata-rata terendah. Statistik deskriptif ini hanya menggambarkan kecenderungan jawaban dan tidak digunakan untuk menyimpulkan pengaruh antarvariabel.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah indikator dipertahankan	Rata-rata skor
Transparansi (X1)	5	3,790
Akuntabilitas (X2)	11	4,018
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	9	3,984
Kualitas SDM (Z)	7	4,073

Sumber: Data primer diolah (2026).

Evaluasi Model Pengukuran

Hasil *Pilot test* terhadap 32 responden menunjukkan bahwa dari 70 indikator yang diuji, 13 indikator memiliki *outer loading* di bawah 0,70 sehingga dieliminasi dan 57 indikator memenuhi kriteria pada tahap kedua. Pada tahap tersebut, seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas, ditunjukkan oleh nilai AVE 0,660–0,727, Cronbach's alpha 0,953–0,974, dan *composite reliability* 0,959–0,977. Nilai HTMT tertinggi sebesar 0,635 (kualitas SDM dengan kualitas laporan keuangan) berada di bawah batas 0,90.

Pada penelitian utama (n = 41), setelah indikator yang tidak memenuhi kriteria dieliminasi, tersisa 32 indikator dengan *outer loading* di atas 0,70 (terendah 0,706 pada AKH2; tertinggi 0,927 pada KLR1), sehingga *Indicator reliability* terpenuhi (Tabel 3). Nilai Cronbach's alpha, rho_A, dan rho_C seluruh konstruk berada di atas 0,70, sehingga kriteria *Internal consistency reliability* terpenuhi. Nilai rho_C akuntabilitas (0,951) dan kualitas laporan keuangan (0,953) sedikit melampaui 0,95, yang menurut Hair et al. (2022) dapat mengindikasikan adanya item yang redundan secara semantik. Selain itu, nilai AVE seluruh konstruk berada di atas 0,50 (0,637–0,694), yang menunjukkan bahwa kriteria *Convergent validity* telah terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Model Pengukuran

Konstruk	Indikator	*Loadings*	Cronbach's alpha	rho_A	CR (rho_C)	AVE
X1 (Transparansi)	TIN3	0,834				
	TIN4	0,799				
	TKB3	0,862	0.877	0,879	0,910	0,669
	TPU2	0,811				
	TPU3	0,782				
X2 (Akuntabilitas)	AKB1	0,762				
	AKB2	0,750				
	AKB3	0,808				
	AKB4	0,815				

Konstruk	**Indikator**	***Loadings***	**Cronbach's alpha**	**rho_A**	**CR (rho_C)**	**AVE**
	AKB5	0,813	0,943	0,950	0,951	0,637
	AKH2	0,706				
	AKH3	0,867				
	AKH4	0,829				
	APS2	0,847				
	APS3	0,820				
	APS4	0,748				
Y (Kualitas Laporan Keuangan)	KLA2	0,748				
	KLA4	0,810				
	KLB1	0,812				
	KLB2	0,737				
	KLB3	0,849	0,944	0,948	0,953	0,694
	KLB4	0,869				
	KLP4	0,828				
	KLR1	0,927				
	KLR2	0,897				
Z (Kualitas SDM)	KSK2	0,885				
	KSK3	0,741				
	KSK4	0,758				
	KSR1	0,837	0,918	0,926	0,935	0,673
	KSR2	0,836				
	KSR3	0,866				
	KSR4	0,809				

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026). CR = composite reliability.

Seluruh nilai HTMT berkisar antara 0,009 hingga 0,882 dan berada di bawah batas 0,90 (Tabel 4), sehingga *Discriminant validity* terpenuhi. Nilai tertinggi terdapat pada hubungan kualitas SDM dengan kualitas laporan keuangan (0,882), sedangkan nilai terendah terdapat pada hubungan masa kerja dengan interaksi Z × X2 (0,009). Dengan demikian, model pengukuran dinyatakan memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas dan dapat dilanjutkan ke evaluasi model struktural.

Tabel 4. Hasil Uji *Discriminant validity* (HTMT)

Konstruk	**Usia**	**Pendidikan**	**Masa kerja**	**X1**	**X2**	**Y**	**Z**	**Z × X1**	**Z × X2**
Usia									
Pendidikan	0,522								
Masa kerja	0,372	0,370							
X1	0,156	0,328	0,412						
X2	0,160	0,238	0,182	0,798					
Y	0,110	0,252	0,382	0,820	0,836				
Z	0,096	0,275	0,262	0,780	0,751	0,882			
Z × X1	0,104	0,332	0,339	0,821	0,319	0,565	0,484		
Z × X2	0,057	0,283	0,009	0,387	0,240	0,248	0,271	0,724	

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026). X1 = transparansi; X2 = akuntabilitas; Y = kualitas laporan keuangan; Z = kualitas SDM.

Evaluasi Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Nilai VIF seluruh prediktor berkisar antara 1,154 hingga 1,247, jauh di bawah batas 3 yang disarankan Hair et al. (2022), sehingga tidak terdapat masalah kolinearitas, termasuk antara variabel interaksi dan prediktor lainnya. Hasil *Bootstrapping* disajikan pada Tabel 5. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (β = 0,024; t = 0,118; p = 0,906), sehingga H1 ditolak. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,444; t = 2,513; p = 0,012), sehingga H2 diterima. Kualitas SDM berpengaruh positif secara langsung (β = 0,371; t = 2,532; p = 0,011). Interaksi kualitas SDM dengan transparansi berpengaruh positif pada taraf 10% (β = 0,353; t = 1,716; p = 0,086), sehingga H3 diterima, sedangkan interaksi kualitas SDM dengan akuntabilitas tidak signifikan (β = −0,243; t = 1,409; p = 0,159), sehingga H4 ditolak.

Tabel 5. Hasil Uji Kolinearitas dan *Bootstrapping*

Hubungan	VIF	Koefisien jalur	T-statistic	P-value	Keputusan
Transparansi (X1) → Y	1,174	0,024	0,118	0,906	H1 ditolak
Akuntabilitas (X2) → Y	1,221	0,444**	2,513	0,012	H2 diterima
Kualitas SDM (Z) → Y	1,214	0,371**	2,532	0,011	Berpengaruh positif
Z × X1 → Y	1,247	0,353*	1,716	0,086	H3 diterima (moderasi semu)
Z × X2 → Y	1,160	−0,243	1,409	0,159	H4 ditolak

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026). Y = kualitas laporan keuangan. VIF variabel kontrol (C) sebesar 1,154. ** p < 0,05; * p < 0,10.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,870	0,838

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026).

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,870 dan *adjusted R-square* sebesar 0,838. Nilai R-square menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, kualitas SDM, variabel interaksi, dan variabel kontrol secara bersama-sama menjelaskan 87,0% variasi kualitas laporan keuangan dalam sampel penelitian. Setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model, nilai *adjusted R-square* menunjukkan daya jelas sebesar 83,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai yang tinggi ini diperoleh dari 41 responden sehingga perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

Pengaruh *Transparansi* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan (β = 0,024; p = 0,906). Dalam kerangka teori keagenan, transparansi diharapkan menekan asimetri informasi karena prinsipal memperoleh dasar informasi untuk mengawasi agen. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum terbukti secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan di Sekretariat Daerah. Keterbukaan informasi penting bagi masyarakat, tetapi belum tentu menjamin ketepatan pencatatan, kelengkapan bukti pendukung, dan kepatuhan pada standar akuntansi yang menentukan kualitas laporan. Kualitas laporan keuangan juga bergantung pada proses pemeriksaan dan verifikasi, sehingga informasi yang terbuka perlu didukung proses administrasi dan akuntansi yang tertib.

Hasil ini sejalan dengan Ferlia et al. (2023) serta Lara Sati dan Taufik (2025), namun berbeda dengan Zubaidah dan Nugraeni (2023), Ibrahim et al. (2024), Utami (2024), dan Hamsinar (2022). Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik objek dan praktik pengelolaan keuangan di masing-masing lokasi. Rata-rata skor transparansi juga merupakan yang terendah di antara variabel penelitian (3,790), meskipun statistik deskriptif tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan pengaruh.

Pengaruh *Akuntabilitas* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($\beta = 0{,}444$; $p = 0{,}012$). Semakin baik pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, yakni tanggung jawab yang jelas, prosedur yang dipatuhi, dan dokumentasi yang dapat ditelusuri, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan: pemerintah daerah sebagai penerima amanah mengelola sumber daya publik, dan pertanggungjawaban yang berjalan baik mempersempit kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal serta mendorong laporan yang lebih tertib dan dapat dipercaya. Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan catatan BPK mengenai keterlambatan pertanggungjawaban hibah dan penatausahaan aset yang belum tertib (Tabel 1), yang pada dasarnya berkaitan dengan proses pertanggungjawaban.

Hasil ini sejalan dengan Ferlia et al. (2023), Utami (2024), Hamsinar (2022), serta Lara Sati dan Taufik (2025), tetapi berbeda dari Zubaidah dan Nugraeni (2023) serta Ibrahim et al. (2024) yang tidak menemukan pengaruh. Berdasarkan koefisien jalur, akuntabilitas (0,444) memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kualitas laporan keuangan dibandingkan transparansi (0,024) dalam model penelitian ini.

Pengaruh *Kualitas SDM* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas SDM berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan ($\beta = 0{,}371$; $p = 0{,}011$). Pegawai yang mampu mengoperasikan sistem akuntansi, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, beradaptasi terhadap perubahan, dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab mendukung penyusunan laporan yang lebih baik. Pengaruh langsung ini menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak hanya berperan sebagai faktor yang mungkin mengubah hubungan transparansi atau akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan, tetapi juga berhubungan langsung dengan variabel dependen. Posisi ganda ini menjadi dasar penentuan jenis moderasi.

Peran Moderasi *Kualitas SDM* pada Pengaruh Transparansi

Interaksi kualitas SDM dan transparansi berpengaruh positif pada taraf 10% ($\beta = 0{,}353$; $p = 0{,}086$; $t = 1{,}716$), sehingga H3 diterima. Sejalan dengan Indrayani (2020), pegawai yang kompeten lebih mampu mengolah keterbukaan informasi menjadi laporan yang berkualitas. Karena kualitas SDM juga berpengaruh langsung ($b_2 = 0{,}371$), menurut Sharma et al. (1981) moderasi yang terjadi tergolong moderasi semu (*quasi moderator*), yaitu variabel yang berinteraksi dengan prediktor sekaligus menjadi prediktor bagi variabel dependen. Secara praktis, transparansi tidak berpengaruh secara langsung, tetapi pengaruhnya bergantung pada kualitas SDM. Mengingat signifikansi hanya tercapai pada taraf 10% dengan 41 responden, temuan ini perlu diuji ulang pada sampel yang lebih besar.

Peran Moderasi *Kualitas SDM* pada Pengaruh Akuntabilitas

Interaksi kualitas SDM dan akuntabilitas tidak berpengaruh ($\beta = -0{,}243$; $p = 0{,}159$), sehingga H4 ditolak. Karena jalur langsung kualitas SDM berpengaruh sedangkan jalur interaksi tidak, kualitas SDM pada hubungan ini hanya berperan sebagai variabel prediktor (Sharma et al., 1981),

dan arah koefisien yang negatif tidak ditafsirkan. Akuntabilitas tampaknya didukung oleh ketentuan, alur persetujuan, dokumentasi, dan pengawasan yang berlaku, sehingga pengaruhnya tidak bergantung pada tingkat kualitas SDM. Temuan ini searah dengan Dreksi et al. (2025) dan Yenni et al. (2020) bahwa kompetensi SDM tidak selalu memoderasi.

Implikasi Temuan

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung relevansi teori keagenan dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya melalui pengaruh positif akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban agen. Penelitian ini juga menambah bukti empiris dari Sekretariat Daerah dan menunjukkan bahwa kualitas SDM dapat berperan berbeda pada dua hubungan, yaitu sebagai moderasi semu pada transparansi dan sebagai variabel prediktor pada akuntabilitas, sehingga memberi perspektif tambahan terhadap penelitian terdahulu yang hasilnya beragam.

Secara praktis, akuntabilitas memiliki koefisien jalur terbesar terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah dapat memprioritaskan penguatan akuntabilitas melalui kejelasan tugas dan tanggung jawab, kelengkapan bukti transaksi, dokumentasi yang dapat ditelusuri, serta verifikasi yang konsisten. Upaya ini relevan dengan temuan BPK mengenai keterlambatan pertanggungjawaban hibah dan penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Karena kualitas SDM berpengaruh langsung dan memperkuat pengaruh transparansi, pelatihan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar keterbukaan informasi dapat tercermin dalam laporan keuangan yang berkualitas. Bagi pegawai pengelola keuangan, peningkatan pemahaman standar akuntansi dan ketelitian pencatatan diharapkan mendukung kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian pada 41 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung ini menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ($\beta = 0{,}024$; $p = 0{,}906$), sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0{,}444$; $p = 0{,}012$). Kualitas SDM berpengaruh positif secara langsung ($\beta = 0{,}371$; $p = 0{,}011$) dan memoderasi pengaruh transparansi pada taraf signifikansi 10% sebagai moderasi semu ($\beta = 0{,}353$; $p = 0{,}086$), tetapi tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas ($\beta = -0{,}243$; $p = 0{,}159$). Model penelitian memiliki nilai R-square sebesar 0,870 (adjusted R-square 0,838), dan tidak ditemukan masalah kolinearitas pada model struktural (VIF 1,154–1,247). Secara teoretis, temuan ini mendukung relevansi teori keagenan dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya terkait hubungan akuntabilitas dan kualitas SDM dengan kualitas laporan keuangan di Sekretariat Daerah.

Secara praktis, Sekretariat Daerah disarankan memperkuat akuntabilitas melalui kejelasan tugas, kelengkapan bukti transaksi, dokumentasi, dan verifikasi yang konsisten, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan akuntansi pemerintahan secara berkelanjutan.
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan 41 responden pada satu objek penelitian, menggunakan persepsi responden pada satu periode waktu, dan menguji moderasi pada taraf signifikansi 10%. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar dan objek yang lebih beragam, menambahkan variabel lain seperti sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi, meninjau kembali redaksi indikator yang memiliki *outer loading* rendah pada pengujian awal, serta melengkapi data kuesioner dengan dokumentasi proses penyusunan laporan atau hasil evaluasi internal..

DAFTAR PUSTAKA

Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2), 50–62. https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2836

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2019 (Nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020)*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024 (Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025)*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Dreksi, E., Sartika, D., Maulina, R., & Mahdani, S. (2025). Peran kompetensi sumber daya manusia dalam mempengaruhi determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 8(1), 59–72.

Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9

Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh transparansi, sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari: Studi empiris pada nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1115–1126. https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.784

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.

Hamsinar, H. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII)*, 3(4), 85–90. https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i4.640

Hardinto, A. A., Kusumaningrum, F., & Kesuma, A. (2025). Pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan transparansi informasi terhadap kinerja keuangan daerah. *Kalbisocio: Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 12(3), 19–23. https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v12i3.4557

Ibrahim, G., Blongkod, H., & Rasjid, H. (2024). Akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada desa-desa di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 951–976. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/7895

Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2286517

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kurniawati, A., & Sadeli, D. (2021). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 2(2), 18–24. https://doi.org/10.23969/brainy.v2i2.41

Luqyana, & Islahuddin. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Apakah aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1), 83–94. https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i1.21068

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.

Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2019). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259–282. https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.308

Pujiono, Wildan, M. A., Kusumaningtias, R., & Putra, R. (2023). *Konsep dan sampel populasi dengan pendekatan statistika* (Vol. 2). Widya Gama Press.

Yenni, E., Irman, M., & Fadrul. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 1(1), 64–88. https://doi.org/10.37385/raj.v1i1.32

Yuditiya, A. I., Rahayu, S., & Tiswiyanti, W. (2023). Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi: Komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 11(2), 197–206. https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.12253

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988. https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3475